

**ANALISIS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BAGI
PENINGKATAN AKSESIBILITAS LEMBAGA KEUANGAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH:

Nama : M.GALLIV AL HAVITZ
NPM : 1705180023
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : M. GALLIV AL HAVITZ
NPM : 1705180023
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BAGI
PENINGKATAN AKSESIBILITAS LEMBAGA KEUANGAN
MASYARAKAT

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si)

Penguji II

(Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Pembimbing

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : M,GALLIV AL HAVITZ
N P M : 1705180023
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
BAGI PENINGKATAN AKSESIBILITAS
LEMBAGA KEUANGAN MASYARAKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
Skripsi.

Medan, Februari 2023

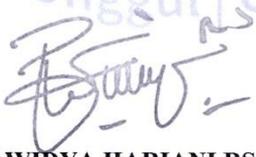
Pembimbing Skripsi


(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.)



(Dr. H. PANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : **M. GALLIV AL HAVITZ**
NPM : 1705180023
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Ultra Mikro Bagi Peningkatan Aksesibilitas lembaga keuangan Masyarakat ” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



M. GALLIV AL HAVITZ

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa ekonomi secara deskriptif mengenai perkembangan Usaha Ultra Mikro di Indonesia dan menganalisa persepsi masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan ultra mikro sebagai Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menganalisa pembiayaan Ultra Mikro di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan Perkembangan Kredit Ultra Mikro di Indonesia sejak awal program dijalankan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, jumlah debitur pada tahun 2020 mencapai 1.120.604 debitur dan jumlah anggaran yang disalurkan mencapai Rp. 3.569.674.180.043. Masyarakat mengetahui adanya pembiayaan ultra mikro namun mereka tidak mengetahui bahwa mekar dan pegadaian adalah wadah dari kebijakan pembiayaan ultra mikro. Selain itu masih banyak masyarakat yang menggunakan hasil pembiayaan sebagai keperluan pribadi hal ini sangat disayangkan karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait mengenai pengelolaan keuangan.

Kata Kunci: Ultra Mikro, Pembiayaan, Lembaga Keuangan

ABTRACT

This study aims to analyze the economics descriptively regarding the development of ultra-micro enterprises in Indonesia and to analyze public perceptions of ultra-micro financing policies as an increase in the accessibility of community financial institutions. This research method is descriptive qualitative to analyze Ultra Micro financing in Medan City. The results of this study show that the development of Ultra Micro Credit in Indonesia since the beginning of the program has continued to increase every year. Where, the number of debtors in 2020 reached 1,120,604 debtors and the total budget disbursed reached Rp. 3,569,674,180,043. The community knows that ultra-micro financing exists, but they do not know that blooms and pawnshops are containers for ultra-micro financing policies. Apart from that, there are still many people who use the results of financing for personal needs, this is very unfortunate because of the lack of supervision from related parties regarding financial management.

Keywords: Ultra Micro, Financing, Financial Institutions

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul *-Analisis Dampak Eksistensi Virtual Event Terhadap Peningkatan Nilai Konsumtif Masyarakat*. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tua saya dan abang saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi alasan saya bertahan dan kuat hingga saat ini, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

4. Ibu Dr Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris sekaligus Dosen Pembimbing Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
7. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Alya, febri, Ica, Wilda, Risma, dll.) serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi semangat menjalani dunia perkuliahan ini.
9. Kepada partner kerja selama saya kuliah, partner selama bergabung dengan MICEB, hingga partner tersingkat saya yang memberikan pengalaman pertama dan terbaik untuk saya.
10. Kepada diri saya sendiri, yang berhasil sampai di titik ini, jauh dari impian dan harapan yang saya inginkan dahulu, lulus dalam waktu 3 tahun sekian bulan, namun dengan segala proses, kerja keras, di bersamain dengan lingkungan program studi yang luar biasa, diberi kesempatan bertemu partner kerja hampir 2 tahun di Badan Pusat Statistik, saya sampai di titik yang luar biasa ini, *-fan, u got it!*”.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam

penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih.

Fanni Khoiriyyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.ii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Batasan Masalah	12
1.4. Rumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	13
1.6.1. Manfaat Akademik	13
1.6.2. Manfaat Non-akademik	13
2.1. Landasan Teoritis	14
2.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi.....	14
2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah	25
2.2 Regulasi Ultra Mikro	32
2.3 Penelitian Terdahulu	35
2.4 Tahapan Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2. Definisi Populasi	37
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.4. Jenis dan Sumber Data	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	39
3.6. Populasi dan Sampel	40
3.7. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1. Perkembangan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia.....	44

4.1.1. Perkembangan Debitur Penerima Kredit Ultra Mikro	46
4.1.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Ultra Mikro	47
4.1.3. Dampak Pelaksanaan Pembiayaan UMi terhadap Debitur	49
4.2. Persepsi Masyarakat Menegenai Kebijakan Pembiayaan Ultra Mikro Sebagai Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia (2016 - 2019).....	5
Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3 1 Definisi Operasional	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia (2015 - 2019)	4
Gambar 2 1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	28
Gambar 2 2 Kurva Peacock dan Wiseman.....	29
Gambar 2 3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave	30
Gambar 4.1 Realisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro	48
Gambar 4 2 Identitas Responden Berdasarkan Usia	51
Gambar 4 3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Gambar 4 4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Dagangan	52
Gambar 4 5 Mengetahui Adanya Pembiayaan Usaha Ultra Mikro.....	52
Gambar 4 6 Kurangnya sosialisasi mengenai pembiayaan ultra mikro	53
Gambar 4 7 Lebih mudah melakukan peminjaman di perbankan.....	54
Gambar 4 8 Syarat yang digunakan untuk pembiayaan usaha ultra mikro.....	54
Gambar 4 9 Pembiayaan Ultra Mikro digunakan Sebagai modal Tambahan.....	55
Gambar 4 10 Sebagian dana dari Pembiayaan digunakan untuk keperluan pribadi	56
Gambar 4 11 Pembiayaan Ultra Mikro meningkatkan pendapatan	56
Gambar 4 12 Pembiayaan sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha ultra mikro.	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total (pertumbuhan ekonomi) di suatu negara dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi yang cepat belum tentu menghasilkan pemerataan distribusi pendapatan. Terdapat semacam trade off antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi. Ketika pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk pemerataan pendapatan maka pertumbuhan ekonomi akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika pembangunan lebih difokuskan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan (Kuncoro, 2006).

Proses pembangunan ekonomi Indonesia telah mengalami pasang surut sejak awal kemerdekaan Indonesia. Dimana, telah terjadi beberapa kali krisis ekonomi telah menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sehingga menimbulkan terjadinya tingkat inflasi yang tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 telah membuat beberapa bank konvensional dilikuidasi karena tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap nasabahnya akibat dari kebijakan suku bunga yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah selama krisis

berlangsung. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat inflasi ketika itu sebesar 77,60% yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20%. Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian.

Ketika terjadi krisis ekonomi 1998, sektor UKM dan UMKM merupakan satu-satunya sektor yang mampu bertahan dari menurunnya perekonomian secara drastis, sementara sektor usaha yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usahanya karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM dan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. (Departemen Koperasi, 2008).

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM dan UMKM hadir menjadi solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM dan UMKM merupakan salah satu industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dan UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. (Departemen Koperasi, 2008)

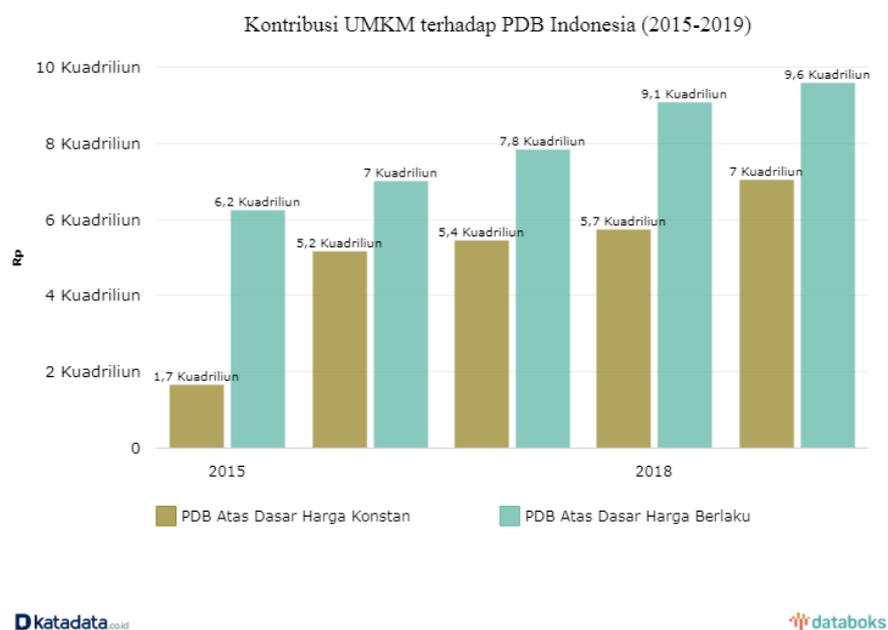
Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menunjukkan peran

yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Peningkatan kegiatan usaha dan peran UKM pasca krisis 1998-2009 tergambar di bawah ini. UKM mengalami perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan populasi UKM tahun 2009 lebih dari 52 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia. Perkembangan UKM dari tahun 2005 hingga 2009 mencapai 12,22%, sedangkan Usaha Skala Besar mengalami penurunan 6,87%. Disamping itu UKM memberikan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97,3% dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp.1.214,7 triliun atau 58,17%. (Badan Pusat Statistik, 2009).

Berdasarkan data Kementriaan Negara Koperasi dan UMKM tahun 2008-2009 menyatakan bahwa UMKM masih menjadi pelaku usaha yang paling banyak yaitu mencapai 52,176 juta unit usaha. Jumlah UMKM ini berkembang sebesar 2,64% dari tahun sebelumnya tahun 2008 yaitu sebesar 51,41 juta unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja UMKM mampu menyerap 97,30% tenaga kerja produktif yang tersedia, dari 97.30% tersebut usaha mikro menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 91,03% sedangkan usaha kecil dan menengah masing-masing mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,56% dan 2,71%, hal itu dikarenakan pada industri mikro dan usaha kecil menggunakan padat karya sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia dari segi unit usaha dan penyerapan tenaganya. Usaha mikro kecil menengah mampu bertahan saat terjadi krisis yang melanda Indonesia, jumlah

unit usaha dan tenaga kerja yang diserap lebih besar dibandingkan dengan industri skala besar maupun sedang. Maka sudah sepantasnya pemerintah tidak menyampingkan peran UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerintah harus turut berperan serta dalam memberdayakan UMKM di antaranya dengan menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada UMKM. (Kuncoro, 2002). Peran penting UMKM pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia di bawah ini.



Sumber : katadata.go.id

Gambar 1 1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia (2015 - 2019)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa UMKM merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di negeri kita. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB atas

dasar harga berlaku sebesar Rp 9.580,8 triliun. Kontribusi ini naik 5,7% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 9.062,6 triliun. Tidak hanya itu, UMKM Indonesia berkontribusi dalam menyerap 119,6 juta atau 96,92% dari total tenaga kerja di unit usaha Indonesia. Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 2,21% dari 2018. Besarnya kontribusi UMKM dikarenakan mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 60,7 ribu Usaha Menengah (UM).

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia berjalan dengan pesat. Perkembangan ini dideskripsikan pada pertumbuhan UMKM yang semakin bertambah, secara kuantitas perbandingan jumlah pelaku UMKM lebih banyak dari pada usaha baesar (UB). Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia pada web www.depkop.go.id, selama tahun UMKM memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dari pada Usaha Besar (UB) dengan persentasi jumlah usaha yang terus meningkat.

Tabel 1 1 Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia (2016 - 2019)

Jenis Usaha	2016	2017	2018	2019
Usaha Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
Usaha Kecil	681.522	731.047	757.090	783.132
Usaha Menengah	59.263	56.551	58.627	60.702
Usaha Besar	4.987	5.370	5.460	5.550

Sumber : Depkop.go.id (2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2016 tercatat 58.521.987, mengalami peningkatan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.271.440 UMKM. Kemudian, jumlah UMKM ini terus bertambah

hingga 1.271.529 tahun 2019. Dengan demikian pertumbuhan UMKM ini juga dapat membantu perekonomian di Indonesia.

Akan tetapi, Setelah krisis ekonomi 1998 dan 2008 mendera negeri ini dan juga perkembangan UMKM yang cukup masiv, saat ini (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM diuji sebagai bumper ekonomi nasional. Lolos sebagai dinamisator ekonomi selama krisis-krisis sebelumnya, pandemi covid-19 menjadi ujian terberat mereka. Seluruh dunia dan bahkan Indonesia digemparkan dengan adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau dikenal dengan istilah Corona Virus Diseases-19 (Covid-19) pada tahun 2020. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Hal ini menyebabkan usaha kecil dan menengah (UMKM) berada diguncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) yang dilakukan pemerintah telah menghentikan aktivitas-aktivitas ekonomi. Dunia UMKM mengalami berbagai macam penurunan disektor permintaan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia.

Asian Development Bank (2020) dalam hasil survei dampak Covid-19 di Indonesia, Thailand, Filipina, dan Laos menyatakan sebanyak 48,6% UMKM di Indonesia terpaksa menutup usahanya. Sebagian besar disebabkan menurunnya permintaan domestik (30,5%), penundaan pengiriman (13,1%), pembatalan kontrak pesanan (14,1%), hambatan produksi dan distribusi (19,8%). Kondisi ini menyebabkan 52,4% pelaku UMKM kehabisan uang tunai dan tabungan sehingga tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya, sedangkan 32,8% lainnya hanya punya uang cadangan dalam sebulan ke depan. Untuk mencukupi modal

kerja yang diperlukan untuk bangkit berusaha kembali, mereka meminjam dari keluarga dan kerabat (39%), memakai dananya sendiri (24,6%), meminjam dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (10,5%) dan hanya 1% yang berhasil meminjam dari perbankan.

Pandemi covid-19 menyebabkan banyak hambatan dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatannya. Salah satu faktor penghambat tersebut ialah terkait keterbatasan modal usaha (Hasanah dkk., 2020). Selain itu, keterbatasan penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM juga menjadi salah satu permasalahan utama perkembangan UMKM (Hasanah dkk., 2020). Hal ini, diakibatkan oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia sehingga UMKM tidak bisa memasarkan produknya secara langsung. Teknologi harusnya dapat berguna untuk mempermudah kehidupan manusia karena dengan adanya teknologi sesuatu yang sulit dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Kurangnya pengetahuan tentang kemajuan teknologi oleh pelaku usaha merupakan hal yang sering menghambat penggunaan teknologi pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di saat PSBB menyebabkan usaha UMKM sulit berkembang.

Pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah dalam proses perbaikan ekonomi nasional. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM harus diselamatkan dari keterpurukan. Hal ini karena UMKM memegang peranan penting dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Saat ini yang dibutuhkan oleh

UMKM adalah penyaluran kredit untuk mencukupi kebutuhan permodalan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM, saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor usaha ini juga mampu menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai dengan 60,42% dari total investasi di Indonesia. Sayangnya kontribusi UMKM tersebut belum diikuti dengan besarnya penyaluran kredit yang masih berkutat di angka 20%. Faktor penyebabnya antara lain karena sulitnya persyaratan pengajuan kredit dan usaha yang tidak memenuhi ketentuan layak untuk mendapatkan kredit perbankan.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut laporan pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% sektor UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi Covid19. Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM. Pada tahun 2021, program PEN Dukungan UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain Subsidi Bunga (KUR dan Non-KUR), Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) serta program UMi. Usaha ultra mikro paling banyak

komposisinya dari seluruh pelaku UMKM (berada di piramida paling bawah), sekaligus paling sulit mengakses pembiayaan. Maka, inisiatif ini penting untuk member dukungan pembiayaan yang cepat, serta menghindar mereka dari renternir . Badan layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) hadir dan membantu para pelaku usaha mikro untuk bangkit dari pandemic. Tidak hanya memulai untuk pembiayaan mudah dan cepat, BLU PIP juga memberikan program pelatihan dan pendampingan bagi para debitur secara menyeluruh dan massif, demikian dilansir dari kementrian keuangan. Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abodemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM. Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Pada tahun 2022 Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun untuk mendorong sektor UMKM dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% yang diberikan sampai Juni 2022.

Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan usaha kerakyatan yang jumlahnya mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68% dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Pemerintah dalam menggerakkan sektor UMKM ditempuh berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas adalah pemberian kredit murah kepada pelaku usaha UMKM. Subsidi bunga kredit untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan, dan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi dengan berfokus pada pengembangan sektor(Usaha Mikro,

Kecil, serta Menengah) UMKM, pemerintah sudah membagikan sebagian program kebijakan, salah satunya merupakan program Pembiayaan Ultra Mikro(UMi).

Program KUR sudah lama digulirkan, yang dimulai sejak jaman pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan Program UMi dimulai pada tahun 2017, yang ditandai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22 tahun 2017 tentang Program Pembiayaan Ultra Mikro. Perbedaan utama antara program KUR dan Pembiayaan UMi adalah penyaluran KUR kepelaku UMKM dilaksanakan oleh perbankan dengan tingkat bunga kredit 7%, peranan pemerintah pada program ini adalah hanya memberikan subsidi bunga dari bunga komersil yang berlaku. Adapun dana yang digunakan murni dari dana lembaga penyalur. Berbeda dengan program pembiayaan UMi, dana yang digunakan murni dari APBN yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan tingkat bunga 9%, bahkan lebih fleksibel karena bisa dengan pola syariah. Dari observasi yang penulis lakukan, pelaksanaan program UMi di Kabupaten Mamuju dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Koperasi Mitra Duafa. Yang paling berkembang dari kedua lembaga tersebut adalah PNM Mekaar. Menurut Pimpinan Cabang PNM Mekaar Mamuju, “jumlah nasabah yang memperoleh layanan PNM Mekaar mencapai 3.134 sampai bulan Desember tahun 2019”.

Pandemi tidak menghentikan langkah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sebagai stimulus kebangkitan pelaku usaha, program relaksasi diberikan selama tahun 2020. Target penyaluran pun terlampaui. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan social menjadi kemandirian usaha yang

menyasar Usaha Mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat (KUR).

Usaha Ultra Mikro (UMi) memeberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sejak disalurkan 2017 pembiayaan ultra mikro(Umi) ini masih mendapat respon masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu mencapai 33.465 debitur dengan akad penyalurannya sebesar Rp 68,389 miliar. Namun tahun 2020 menurun drastis sampai dengan 8.210 debitur dengan akad penyalurannya sebesar Rp. 4.351.500.000,-. Namun, penyaluran pembiayaan usaha ultra mikro(UMi) di 2018 hanya sebesar Rp 61,636 miliar kepada 21.070 debitur di Siantar,Batubara, Deliserdang, Langkat, Kota Medan, Humbahas, Hias, Nias Utara, Nias Selatan dan Phakpak Barat. Realisasi penyaluran pembiayaan usaha ultra mikro(UMi) di 2018 terjadi penurunan penyerapan sekitar Rp 6 miliar lebih. Sementara penyaluran pembiayaan ultra mikro (Umi) 2019 atau posisi September baru Rp 4,352 miliar kepada 8.210 debitur.

Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 75,33% (BPS, 2018). Menurut Tambunan (2011) UMK banyak yang didirikan oleh individu atau rumah tangga miskin karena tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Maka, pengembangan UMK merupakan salah satu solusi mengurangi pengangguran sekaligus kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan diatas Dari penjelasan di atas diketahui pembiayaan usaha ultra mikromemberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, calon peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan

judul “**Analisis Pembiayaan Ultra Mikro Bagi Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Pandemic covid-19 menyebabkan 48,6% UMKM di Indonesia tutup.
2. Pengusaha UMKM mengalami kekurangan modal dalam melanjutkan usahanya pada masa pandemic covid-19
3. Kontribusi UMKM yang cukup besar terhadap perekonomian belum diikuti dengan besarnya penyaluran kredit yang masih berkutat di angka 20%.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti fokus membatasi masalah pada Kebijakan pembiayaan ultra mikro. .

1.4 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perkembangan Pembiayaan ultra mikro di Indonesia ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan ultra mikro sebagai Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan Analisa ekonomi secara deskriptif mengenai perkembangan Usaha Ultra Mikro di Indonesia.

2. Menganalisa persepsi masyarakat mengenai kebijakan pembiayaan ultra mikro sebagai Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1.6.1. Manfaat Akademik

a. Bagi Peneliti :

1. Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
2. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan terkait.

b. Bagi Mahasiswa

1. Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis dan sistematis
2. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.6.2. Manfaat Non-akademik

- a. Sebagai bahan masukan pemerintah dalam penetapan kebijakan Usaha Ultra Mikro.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (gross national income- GNI) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan- seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap- sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan

absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran. Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok- kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19).

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

- a. Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau

persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

- b. Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.”
- c. Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal

diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga

kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan: (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan

ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation*. Buku ini diterbitkan 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo didasarkan pada asumsi bahwa:

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri;
- 2) law of diminishing return” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar-benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;
- 6) Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (given);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;
- 9) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan

bahwa baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;

10) Terdapat persaingan yang sempurna;

11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan.” Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. (Jhingan, 2010).

B. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan

pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (human capital). (Todaro & Smith, 2011)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas disektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011).

C. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang- bidang nonpertanian memang ada, tetapi begitu

banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan, ke sektor industri di mana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut :

- 1) Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif;
- 2) Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja;
- 3) Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi);
- 4) Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap;
- 5) Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (return to scale) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel;
- 6) Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol;
Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (output) pertanian.
- 7) Output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja;
- 8) Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen;
- 9) Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian;
- 10) Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk produk

pertanian

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali *tahap ketiga*, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu teori makro dan teori mikro.

A. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,2009).

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
- c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga

semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. (Mangkoesobroto, 2001).

2. Teori Adolf Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Mangkoesobroto, 2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

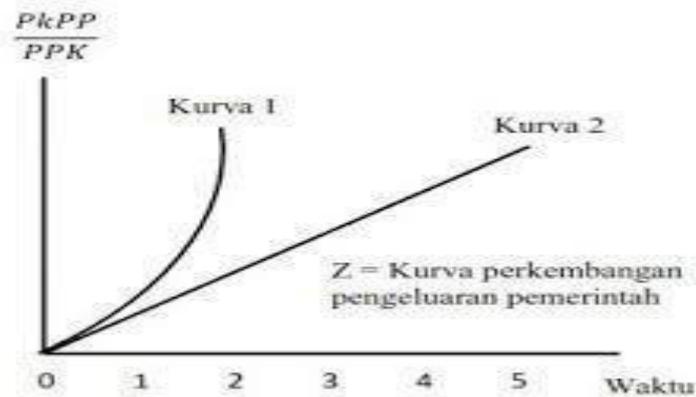
$$\frac{PPk_1}{PPk_1} < \frac{PkPPn}{PPk_2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPk_n}$$

Dimana :

PPkP : Pengeluaran pemerintah perkapita

PPK: Pendapatan perkapita (GDP/jumlah penduduk)

1,2,...n : jangka waktu (tahun)



Gambar 2 1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Kurva diatas menunjukkan secara relative peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wager mendasarkan pandanganya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organisasi yang mengagap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

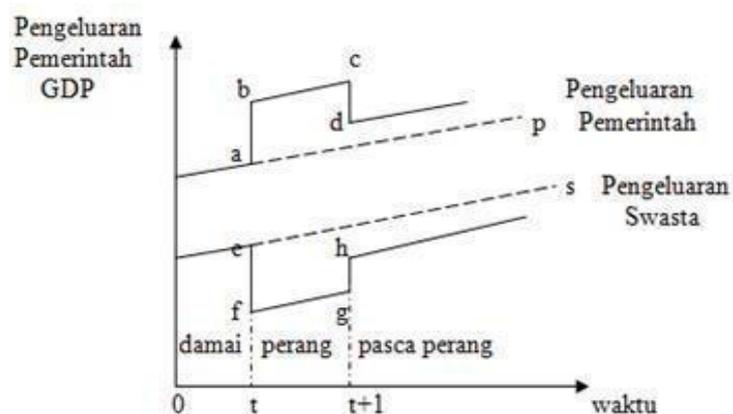
3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian

(*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini :

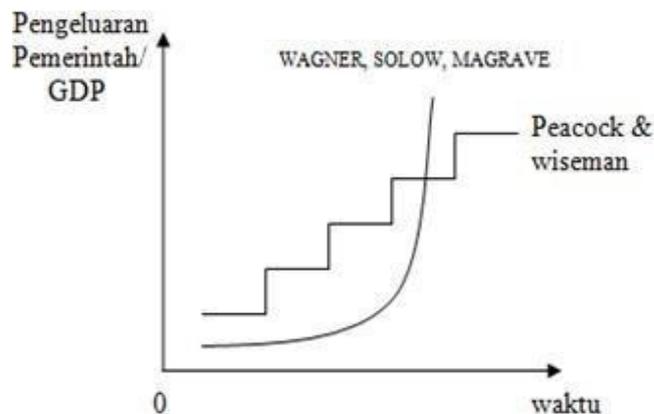


Gambar 2 2 Kurva Peacock dan Wiseman

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Gambar 2 3 Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave

Sumber : Mangkoesobroto, 2001

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan

pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

B. Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. (Mangkoedobroto : 2001). Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a) Penentuan Permintaan

$$U^i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

- U^i = $f(G, X)$
- G = vektor dari barang publik
- X = vektor barang swasta
- I = individu; = 1, .. , m
- U = fungsi utilita

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu (i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak G_k . Untuk menghasilkan i barang K sebanyak G_k , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya Pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu,

pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

b) Penentuan Tingkat Output

$$U_p = g(X, G, S) \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana :

- Up = fungsi utilitas
- S = keuntungan yang diperoleh politisi
- G = Vektor barang publik
- X = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots \dots \dots (2-4)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots \dots \dots (2-5)$$

Dimana :

- P = Vektor harga barang swasta
- X = Vektor barang swasta
- Bi = Basis pajak individu 1
- Mi = Total pendapatan individu 1
- T = Tarif Pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

2.2 Regulasi Ultra Mikro

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan mempunyai program pembiayaan ultra mikro (UMi) yang bisa dijadikan solusi untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat guna memulai ataupun mengembangkan usaha bagi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal

dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu menyokong ekonomi rumah tangga yang akan berpengaruh pada peningkatan nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha.

Pembiayaan Ultra Mikro ialah program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sarasannya adalah usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)³⁸, baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya.

Pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang berperan sebagai fungsi koordinator dana. Sumber dana pembiayaan UMi berasal dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan sumber lainnya. Dalam Bab V pasal 11 tentang Skema Pembiayaan Ultra Mikro menuturkan bahwa BLU PIP menyalurkan pembiayaan kepada penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan syariah. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) disalurkan kepada tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank, yakni PT. Pegadaian, PT. Permodalan Nasional Madani, dan PT. Bahana Artha Ventura.

Pembiayaan Ultra Mikro mulanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) No. 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 331). Setelah itu diatur ulang dalam PERMENKEU 95/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 No. 1088) yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang baru.

Pertimbangan kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011.

Dasar hukum pelaksanaan PERMENKEU No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

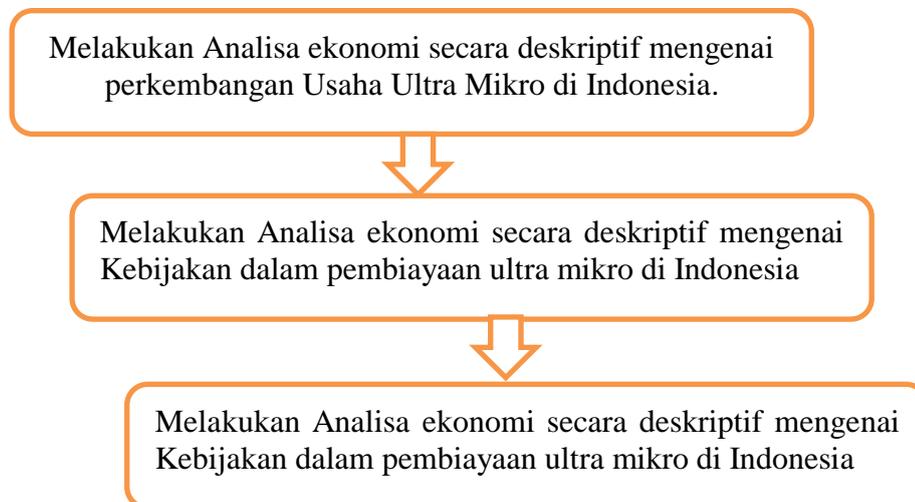
2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vincencia Dian Priliyanti Hia (2021)	Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Petumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Mikro dan Kecil	Dalam usaha tingkat ekonomi diatas 5 persen, sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia telah menerbitkan pembiayaan Ultra Mikro (UMI), suatu program pembiayaan yang menyasar usaha dibawah katagori mikro dan kecil,yaitu usaha ultra mikro.	

02	Iis Surgawati (2020)	Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia dan struktur urban berpengaruh positif signifikan, karakteristik daerah dan krisis keuangan global berpengaruh negative signifikan,	

2.4 Tahapan Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa produksi secara deskriptif bagi Usaha Ultra Mikro dalam mengembangkan usahanya di pasar yang kompetitif di kota Medan pada era teknologi digital di kota Medan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kualitatif yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (Kuncoro, 2013). Data yang dihimpun meliputi data penerima pembiayaan Ultra Mikro di Kecamatan Medan Belawan

3.2 Definisi Populasi

Definisi populasi merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara sampel yang satu dengan sampel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun definisi populasi penelitian seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 1 Definisi Operasional

Sampel	Definisi operasional	Sumber data
Usaha Ultra Mikro	Pedagang kaki yang mobile maupun yang fixed	Responden

Pembiayaan UMI	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan social menjadi kemandirian usaha yang menysasar usaha mikro yang berada dilapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).	Responden
-------------------	--	-----------

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kecamatan Medan Belawan. Alasan dipilihnya wilayah tersebut karena merupakan salah satu kecamatan pesisir dengan usaha ultra mikro yang tersebar merata di sekitar kecamatan Medan belawan

b. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan yaitu Juli - Oktober.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif yang bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. (Kuncoro, 2013)

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data bersumber dari hasil kuesioner pemilik usaha ultra mikro di kota Medan dengan pembagian kuesioner langsung sebanyak 20% , melalui google form sebanyak 80%, dan melakukan wawancara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembang lagi.

Data primer diperoleh menggunakan kuesioner (angket) yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan secara serentak (Kuncoro, 2013). Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti.

Teknik pengambilan sampel ada dua yaitu:

1. Purposive Sampling

Purposive Sampling yakni teknik pengambilan sampel sumberdata

dengan pertimbangan tertentu, sumber data adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data seperti yang tersebut diatas.

2. *Snowball Sampling*

Snowball Sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, makin lama semakin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.

3.6 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku Usaha Ultra Mikro yang terdaftar di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 320 usaha ultra mikro.

b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan (*subset*) dari unit populasi. Design sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling*, pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini digunakan untuk memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2013).

Penelitian ini memiliki jumlah total populasi yaitu 320 maka dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan menggunakan taraf kesalahan yaitu sebesar 10%, dengan perhitungan yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

E = Standarisasi *Error*

$$n = \frac{320}{1 + 320 (0.2)^2}$$

$$n = \frac{320}{1 + 12.8}$$

$$n = \frac{320}{13.8}$$

$$n = 23.18$$

$$n = 23$$

Maka berdasarkan populasi rumus *slovin* diatas, dapat diketahui bahwa sampelnya adalah 23 orang.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan mengenai teknik yang digunakan dalam mengambil data dan analisis data. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktifitas yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta pembuktian. Ketiga alur aktifitas tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data.

1. Reduksi data

Aktivitas reduksi data ialah mengelola data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang diringkas dan disistematisasikan, agar dipahami dan dicermati oleh pembaca. Reduksi data ini merupakan satu bentuk analisis data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir data penelitian dapat dibuat verifikasi. Dalam hal ini peneliti memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan proses dalam menjalankan bisnis usaha cafe terhadap perubahan perilaku orang, dari hasil wawancara dan observasi lapangan ditambahkan dengan dokumentasi yang ada, sehingga akhirnya penelitian ini dapat dipahami dan dicermati secara mudah oleh pembaca.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan menyusun informasi secara baik dan akurat untuk memperoleh beberapa kesimpulan yang valid dan merealisasikan procedural lanjutan. Dengan eksisnya data akurat ini secara otomatis membantu proses yang sedang terjadi, untuk diadakan analisis lebih lanjut, tentunya mengacu kepada data yang ada.

3. Penarikan kesimpulan dan pembuktian

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas analisis data. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi yang diuraikan. Disamping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti proses analisis data sudah final, akan tetapi masih ada tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan

pertanyaan singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan. Dengan ungkapan lain adalah hasil temuan penelitian ini betul-betul merupakan karya ilmiah yang mudah dipahami dan dicermati.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Perkembangan Pembiayaan Ultra Mikro di Indonesia

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan mempunyai program pembiayaan ultra mikro (UMi) yang bisa dijadikan solusi untuk memberikan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat guna memulai ataupun mengembangkan usaha bagi para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat kecil. Dengan adanya program ini, diharapkan mampu menyokong ekonomi rumah tangga yang akan berpengaruh pada peningkatan nilai keekonomian pribadi dan nilai keekonomian usaha.

Pembiayaan Ultra Mikro ialah program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang sarannya adalah usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro Syariah adalah Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan/atau jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya.

Pembiayaan UMi dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) yang berperan sebagai fungsi koordinator dana. Sumber dana pembiayaan UMi berasal dari rupiah murni, hibah, pendapatan dari pembiayaan dan sumber lainnya. Dalam Bab V pasal 11 tentang Skema Pembiayaan Ultra Mikro menuturkan bahwa BLU PIP menyalurkan pembiayaan kepada penyalur melalui pembiayaan konvensional dan/atau pembiayaan syariah.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) disalurkan kepada tiga Lembaga Keuangan Bukan Bank, yakni PT. Pegadaian, PT. Permodalan Nasional Madani, dan PT. Bahana Artha Ventura. Pembiayaan Ultra Mikro mulanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) No. 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 331). Setelah itu diatur ulang dalam PERMENKEU 95/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1088) yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Ultra Mikro yang baru.

Pertimbangan kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan usaha ultra mikro yang berbasis ekonomi kerakyatan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2011. Dasar hukum pelaksanaan PERMENKEU No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah; Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan No. 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

4.1.1. Perkembangan Debitur Penerima Kredit Ultra Mikro

Pemerintah dalam upaya membantu para pelaku usaha mikro atau kecil. Adapun, sumber pendanaan UMi berasal dari APBN, kontribusi lembaga daerah, dan kontribusi lembaga-lembaga keuangan baik domestik maupun global. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *coordinated fund* atau pengelola pembiayaan UMi. PIP sebagai perpanjangan tangan pemerintah akan menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro kepada debitur melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Dalam hal ini, LKBB yang telah bekerja sama dengan PIP diantaranya adalah PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Dalam perkembangannya, minat masyarakat terhadap pembiayaan UMi cukup besar. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah debitur kredit Ultra Mikro (UMi)

Tabel 4.1 Jumlah Debitur Penerima Kredit Ultra Mikro

Tahun	Jumlah Debitur
2017	307.033
2018	557.112
2019	809.926
2020	1.120.604

Sumber : <https://djpb.kemenkeu.go.id/>

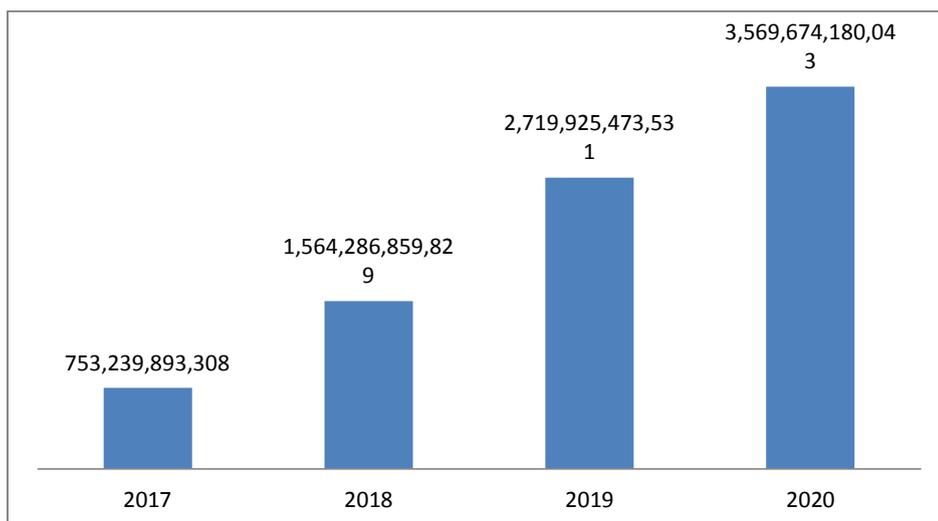
Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah debitur Kredit Ultra Mikro di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2017 jumlah debitur mencapai 307.003

debitur, mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 557.112, tahun 2019 menjadi 809.926, hingga pada tahun 2020 mencapai 1.120.604 debitur.

Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II menyalurkan realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk selanjutnya disalurkan kepada para debitur penerima Kredit Ultra Mikro (KUMi) di berbagai wilayah di Indonesia melalui sejumlah lembaga penyalur. Sampai dengan 31 Juli 2020 kredit Ultra Mikro telah menjangkau 2.794.675 debitur yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

4.1.2. Perkembangan Penyaluran Kredit Ultra Mikro

Secara nasional, target debitur untuk menyalurkan pembiayaan dari UMi pada 2020 adalah 1 juta debitur. Target ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yakni 800.000 debitur. Setelah pembiayaan UMi dimulai pada tahun 2017 hingga mencapai 300.000 peminjam, target utang meningkat signifikan pada tahun 2022 untuk 2 juta peminjam atau setara dengan 666,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memperluas jangkauan UKM untuk menggenjot pembiayaan UMi guna mendukung pemulihan ekonomi di berbagai daerah. Keseriusan pemerintah dalam memperluas jangkauan UKM dapat dilihat dari gambar realisasi penyaluran kredit UMi dibawah ini.



Gambar 4.1 Realisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro

Realisasi UMi secara nasional pada tahun 2020 mencapai Rp 3.569.674.180.043 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga 2019. Dimana, pada tahun 2017 jumlah penyaluran kredit sebesar Rp. 753.239.893.308 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp. 1.564.286.859.829 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.719.925.473.531. Penyaluran pembiayaan UMi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 diharapkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan seperti realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tujuan utama dalam rangka pemulihan ekonomi dapat tercapai.

Saat ini, hanya 3,47 persen dari 64 juta UKM Indonesia yang termasuk dalam kategori ini wirausaha (Kementerian Koperasi & UMKM, 2021). Rendahnya *entrepreneurship* ini membutuhkan terobosan bagi UMKM untuk melakukan upgrade di masa yang akan datang dapat naik kelas. Pembentukan Ekosistem ultra mikro berpotensi mendorong perusahaan-perusahaan setingkat UMi dan UMKM untuk bertumbuh dan naik kelas.

4.1.3. Dampak Pelaksanaan Pembiayaan UMi terhadap Debitur

Untuk mengetahui apa dampak pelaksanaan pembiayaan UMi terhadap debitur dalam hal kebaikan bersama, diukur nilai keuangan debitur. Nilai finansial debitur ditentukan oleh survei nilai finansial utang dan survei nilai finansial paralel. Pernyataan Nilai Ekonomi Debitur disiapkan oleh Dinas Pendapatan Negara (KPPN) dan Kuesioner terlampir disiapkan oleh Kanwil Kementerian Keuangan.

Penyaluran pembiayaan UMi telah direalisasikan ke berbagai sektor perekonomian yaitu sektor perdagangan eceran, sektor industri pengolahan, sektor perikanan, pertanian dan perkebunan, serta sektor jasa. Data BLU PIP menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 sampai 2021, dana pembiayaan UMi yang disalurkan ke sektor perdagangan eceran memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 94,48%, disusul oleh sektor perikanan, pertanian dan perkebunan sebesar 3,51%, sektor industri pengolahan sebesar 1,09%, serta sektor jasa sebesar 0,92%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan eceran mempunyai peran yang paling signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui usaha ultra mikro, yang melayani langsung kebutuhan konsumen akhir. Tidak dapat dimungkiri bahwa pada masa pandemi Covid-19 sektor ini yang paling terdampak. Dengan adanya pembiayaan UMi diharapkan usaha ultra mikro bisa tumbuh berkembang, naik kelas menjadi bankable, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

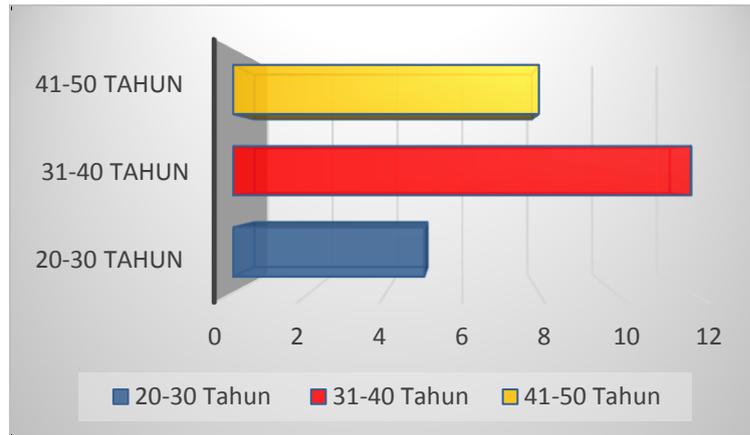
Dampak positif pembiayaan UMi juga dibuktikan dengan hasil survei baseline dan endline yang menunjukkan adanya kenaikan nilai keekonomian

debitur UMi sebesar 2,79 poin di tahun 2021, dari 49,85 di semester I tahun 2020 (baseline) menjadi 52,64 di semester I tahun 2021 (endline). Hal ini mengindikasikan adanya kesejahteraan yang makin meningkat setelah debitur menerima pembiayaan UMi, dan selanjutnya dapat meningkatkan geliat sektor perekonomian daerah yang terus tumbuh.

4.2. Persepsi Masyarakat Menegenai Kebijakan Pembiayaan Ultra Mikro

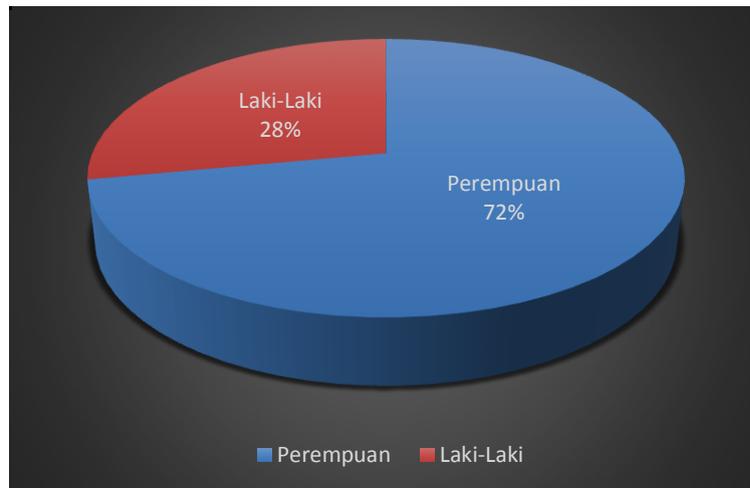
Sebagai Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada Kecamatan Medan Belawan. Alasan pemilihan sampel di Kecamatan Medan Belawan dikarenakan Belawan tersebut salah satu kawasan pesisir kota medan dan banyak nya masyarakat yang menerima kebijakan pembiayaan ultra mikro. Dalam hal ini data diperkuat dengan diperoleh dari observasi lapangan, maka dilakukan riset menggunakan penyebaran beberapa kuesioner kepada masyarakat yang mendapatkan pembiayaan ultra mikro. Total kuesioner yang disebar sebanyak 25 responden penerima pembiayaan ultra mikro di daerah kecamatan medan belawan. Hal ini dilakukan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap pembiayaan ultra mikro sebagai peningkatan aksesibilitas lembaga keuangan. Berikut ini penjelasan dari analisis mengenai hasil jawaban juesioner serta juga gambaran responden yang menjawab kuesioner.



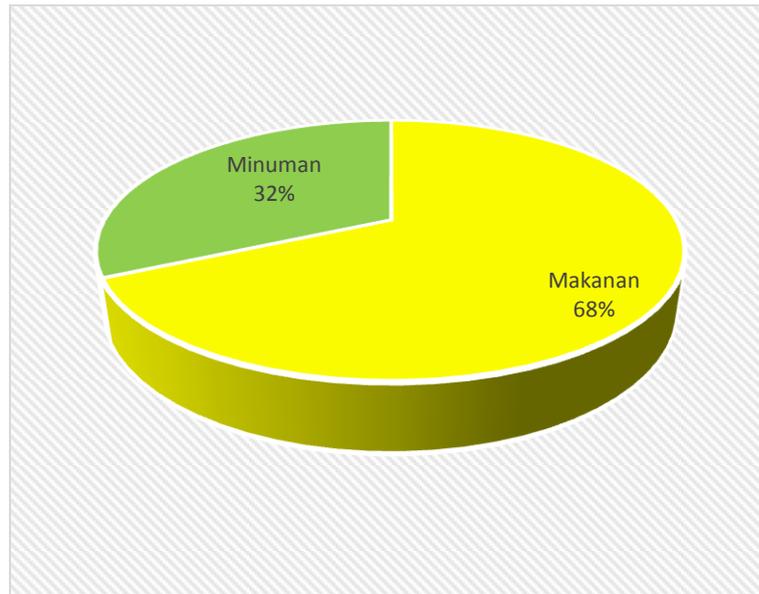
Gambar 4 2 Identitas Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar di atas , hasil identifikasi keadaan umum responden berdasarkan usia paling banyak dikisaran usia 31-40 tahun yaitu 12 responden. Kisaran usia 41-50 tahun berjumlah 8 responden. Sedangkan untuk kisaran usia termuda yaitu 20-30 tahun berjumlah 5 responden.



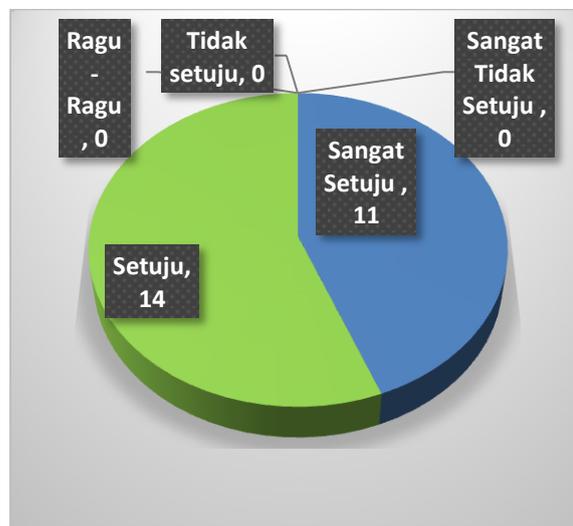
Gambar 4 3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi keadaan umum menurut jenis kelamin menunjukkan 18 pelaku usaha adalah perempuan dengan persentase 72 %. Sedangkan Laki-Laki sebanyak 7 pelaku usaha dengan persentase 28% sebagai responden dalam penelitian ini. Kesimpulannya mayoritas yang menjadi responden yaitu perempuan atau kaum ibu.



Gambar 4 4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Dagangan

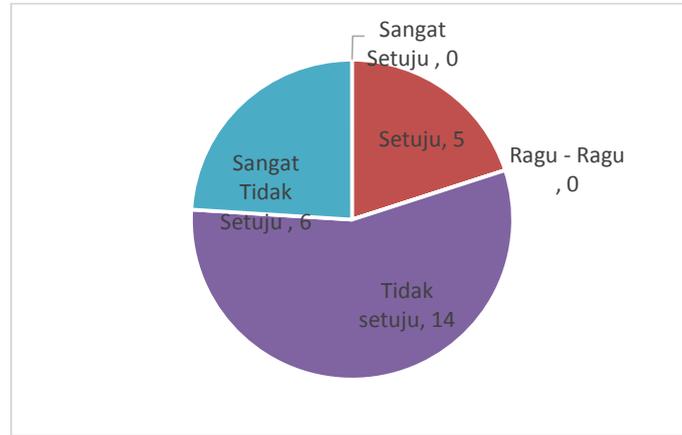
Berdasarkan gambar di atas, hasil identifikasi jenis usaha responden menunjukkan penjual makanan sebanyak 17 pelaku usaha. Jenis usaha minumana sebanyak 8 pelaku usaha.



Gambar 4 5 Mengetahui Adanya Pembiayaan Usaha Ultra Mikro

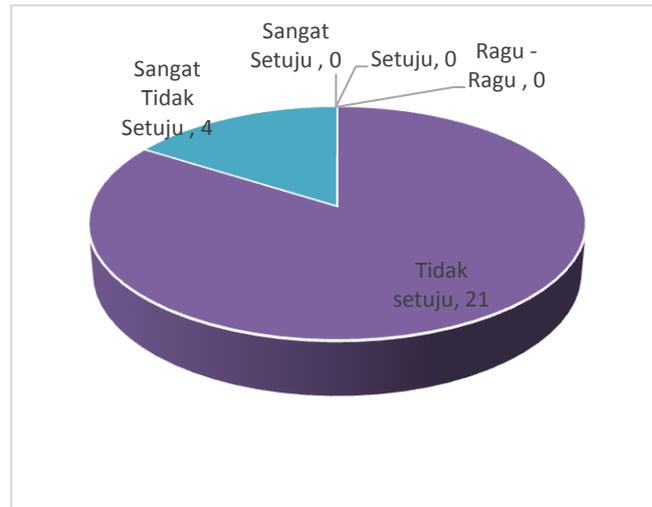
Gambar di atas menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku usaha ultra mikro mengetahui adanya pembiayaan usaha ultra mikro yaitu sebanyak 11 responden menyatakan sangat setuju, 14 responden menyatakan setuju. Namun Para pelaku

usaha ultra mikro tidak mengetahui adanya kebijakan bantuan pembiayaan usaha ultra mikro berupa mekaar dan pegadaian, mereka hanya mengetahui bahwa mekaar dan pegadaian hanya sebagai penyalur peminjaman biasa saja.



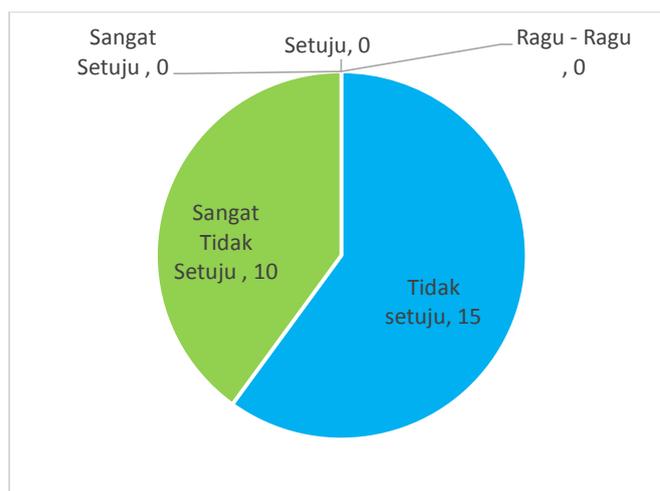
Gambar 4 6 Kurangnya sosialisasi mengenai pembiayaan ultra mikro

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sebanyak 14 respoden menyatakan tidak setuju untuk pernyataan kurang nya sosialisai mengenai pembiayaan usaha ultra mikro, 6 responden menyatakan sangat tidak setuju dan 5 responden lainnya menyatakan setuju. responden yang menyatakan setuju dengan alasan mereka mendapatkan informasi tentang pembiayaan ultra mikro bukan dari pemerintah setempat melainkan dari keluarga, teman dan informasi dari internet, untuk itu mereka berpendapat kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.



Gambar 4 7 Lebih mudah melakukan peminjaman di perbankan

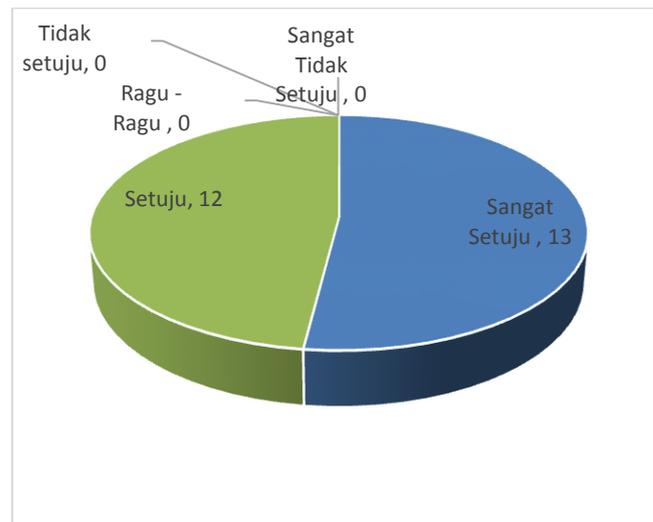
Berdasarkan gambar dia atas tidak satu respondenpun yang menyatakan setuju untuk pernyataan “lebih mudah melakukan peminjaman di perbankan dari pada pembiayaan ultra mikro”. Sebanyak 21 responden menyatakan tidak setuju dan 4 responden lainnya menyatakan sangat tidak setuju. pernyataan ini dikarenakan pembiayaan ultra mikro sangat mudah untuk di daftarkan dan pembiayaan tidak mengharuskan adanya angunan saat melakukan peminjaman.



Gambar 4 8 Syarat yang digunakan untuk pembiayaan usaha ultra mikro.

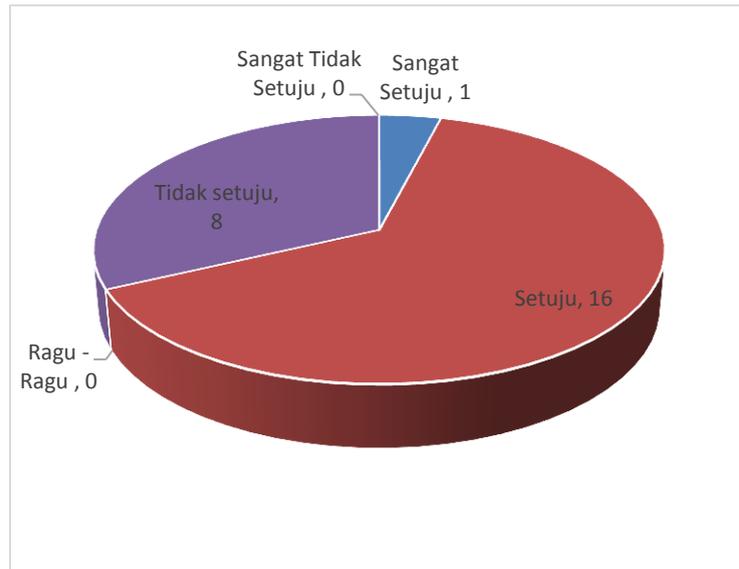
Berdasarkan gambar dia atas tidak satu respondenpun yang menyatakan setuju untuk pernyataan “ Syarat yang digunakan untuk pembiayaan usaha ultra

mikro” 15 responden menjawab tidak setuju dan 10 responden menjawab sangat tidak setuju. dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat merasa syarat untuk melakukan pengajuan masih dalam kategori yang tidak memberatkan.



Gambar 4 9 Pembiayaan Ultra Mikro digunakan Sebagai modal Tambahan.

Seluruh responden menggunakan pembiayaan sebagai tambahan modal. Hal ini didukung oleh jawaban responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 13 responden dan 12 responden menyatakan setuju.



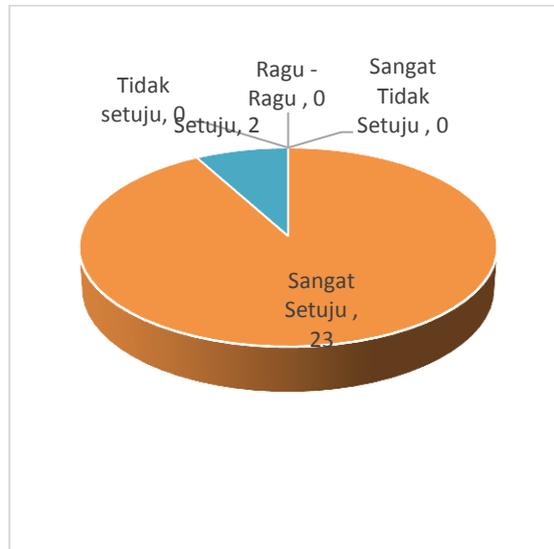
Gambar 4 10 Sebagian dana dari Pembiayaan digunakan untuk keperluan pribadi

Berdasarkan gambar diatas sebanyak 8 responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan “sebagian dana yang didapat digunakan untuk keperluan pribadi” 16 responden menjawab setuju dan 1 reponden lainnya menjawab sangat setuju. pernyataan ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak penyaluran tentang pengelolaan keuangan bagi penerima pembiayaan.



Gambar 4 11 Pembiayaan Ultra Mikro meningkatkan pendapatan

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan responden meningkat dengan adanya pembiayaan ultra mikro yaitu sebanyak 23 responden menyatakan sangat setuju, 2 responden menyatakan setuju.



Gambar 4 12 Pembiayaan sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha ultra mikro.

Gambar di atas menunjukkan bahwa usaha penerima mengalami perkembangan setelah menerima pembiayaan. Hal ini didukung oleh jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 responden dan 2 responden menjawab setuju. dan tidak 1 respondenpun yang menyatakan tidak setuju.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terdapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perkembangan Kredit Ultra Mikro di Indonesia sejak awal program dijalankan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, jumlah debitur pada tahun 2020 mencapai 1.120.604 debitur dan jumlah anggaran yang disalurkan mencapai Rp. 3.569.674.180.043.
2. Masyarakat mengetahui adanya pembiayaan ultra mikro namun mereka tidak mengetahui bahwa mekar dan pegadaian adalah wadah dari kebijakan pembiayaan ultra mikro. Selain itu masih banyak masyarakat yang menggunakan hasil pembiayaan sebagai keperluan pribadi hal ini sangat disayangkan karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait mengenai pengelolaan keuangan

5.2. Saran

1. Pemerintah dan pihak penyedia layanan kredit UMi harus lebih selektif dalam menentukan calon debitur penerima program sehingga penyaluran dana akan lebih tepat sasaran
2. Penyaluran program harus dibarengi dengan pelatihan pengelolaan keuangan UMKM sehingga alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam rangka keberlangsungan UMKM.
3. Sebagai penerima program UMi masyarakat harus mampu bertanggung jawab dalam mengelola pinjaman tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah Achmad Muttaqin dan Arina Rusyda Hartono, “Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogiri”, dalam el Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol. 2 No. 2 (JuliDesember 2019), Universitas Brawijaya, h. 288. 42
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jogloabang, ”PERMENKEU 95/PMK/05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro”, <https://www.jogloabang.com/ekbis/permenkeu-95pmk052018-pembiayaan-ultra-mikro>, diakses pada 05 Juni 2021, pukul 11.24 WIB.
- Kuncoro, Mudrajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan*.(Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlanga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- PERMENKEU Nomor 193/PMK.05/2020, BAB XV Pasal 38.
- PERMENKEU Nomor 193/PMK/05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

LAMPIRAN KUESIONER

ANALISIS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BAGI PENINGKATAN AKSESIBILITAS LEMBAGA KEUANGAN MASYARAKAT

NOMOR RESPONDEN : (Diisi oleh Peneliti)

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden : _____

Usia : _____

Jenis Usaha : _____

Mengetahui Adanya Program Pembiayaan Ultra Mikro :

- a. Ya b. Tidak

Beri tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia dengan tanda centang (v) dan berikan pernyataan berikut salah satu jawaban menurut pendapat Anda.

Petunjuk:

- SS = Sangat Setuju
S = Setuju
RG = Ragu-Ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pelaku UMKM Mengetahui Adanya Bantuan Pembiayaan Usaha Ultra Mikro					
2	Kurangnya sosialisasi mengenai Pembiayaan Usaha Ultra Mikro					
3	Lebih mudah melakukan peminjaman di perbankan dari pada Pembiayaan Usaha Ultra Mikro					

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
4	Syarat yang digunakan untuk Pembiayaan Usaha Ultra Mikro memberatkan masarakat sehingga tidak ingin mendaftar Pembiayaan Usaha Ultra Mikro					
5	Pembiayaan Usaha Ultra Mikro di Gunakan Sebagai Modal Tambahan Bukan Sebagai Modal Awal					
6	Sebagian Dana Dari Pembiayaan Usaha Ultra Mikro di Pergunakan Untuk Keperluan Pribadi					
7	Pembiayaan Usaha Ultra Mikro Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Ultra Mikro					
8	Pembiayaan Usaha Ultra Mikro Bermanfaat Terhadap Pengembangan Modal Usaha Ultra Mikro					

Lampiran Data Kuesioner

Usia	Jenis Kelamin	Jenis Usaha	Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	Pertanyaan_6	Pertanyaan_7	Pertanyaan_8
20-30 Tahun	Laki-Laki	Makanan	4	5	1	1	4	4	5	5
20-30 Tahun	Laki-Laki	Makanan	4	2	2	2	4	4	5	5
20-30 Tahun	Laki-Laki	Makanan	4	2	2	1	4	4	5	4
20-30 Tahun	Laki-Laki	Minuman	4	5	2	2	5	2	5	4
20-30 Tahun	Laki-Laki	Makanan	4	2	2	2	4	4	5	5
41-50 Tahun	Laki-Laki	Minuman	4	1	2	2	5	4	5	5
41-50 Tahun	Laki-Laki	Makanan	4	1	2	2	5	2	5	5
41-50 Tahun	Perempuan	Minuman	4	2	2	1	4	4	4	5
41-50 Tahun	Perempuan	Minuman	4	1	2	2	4	4	4	5
41-50 Tahun	Perempuan	Makanan	4	1	2	2	5	5	5	5
41-50 Tahun	Perempuan	Makanan	4	5	2	2	5	4	5	5
41-50 Tahun	Perempuan	Minuman	4	1	2	1	4	4	5	5
41-50 Tahun	Perempuan	Makanan	4	2	2	2	5	2	5	5
41-50 Tahun	Perempuan	Makanan	4	1	2	2	5	4	5	5
31-40	Perempuan	Makanan	5	2	1	1	4	2	5	5

Tahun										
31-40 Tahun	Perempuan	Minuman	5	5	2	2	5	4	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	2	2	4	4	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	1	2	5	4	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Minuman	5	5	2	1	4	2	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	2	2	4	2	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	1	1	5	2	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	2	2	4	2	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Minuman	5	2	2	1	5	4	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	2	1	4	4	5	5
31-40 Tahun	Perempuan	Makanan	5	2	2	1	4	4	5	5



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2737/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/6/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 29/6/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M GALLIV AL HAVITZ
NPM : 1705180023
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

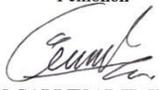
Identifikasi Masalah : 1. Banyak nya usaha kecil menengah yang menggunakan kredit usaha rakyat
2. Pnm merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah
3. Penggunaan pnm bukan hanya dari usaha kecil menengah

Rencana Judul : 1. Analisis implementasi kebijakan asuransi usaha tani padi (AUTP) dalam mengatasi gagal panen di kecamatan aceh tamiang
2. Analisis peranan kredit usaha rakyat PNM bagi pendapatan usaha makro kecil menengah pada kecamatan aceh tamiang
3. Analisis pengaruh kualitas lingkungan hidup terhadap tingkat kebahagiaan penduduk indonesia 2012

Objek/Lokasi Penelitian : Aceh tamiang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(M GALLIV AL HAVITZ)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2737/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/29/6/2022

Nama Mahasiswa : M GALLIV AL HAVITZ

NPM : 1705180023

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan pembangunan daerah

Tanggal Pengajuan Judul : 29/6/2022

Nama Dosen pembimbing*) : Dra. Roswita Hafni, M.Si

Judul Disetujui**)

Analisis Evaluasi Kelebihan Pambiseca
Ultra Mikro (UMi) bagi Peningkatan
Aksesibilitas Layanan Keuangan Masyarakat

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawitya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, 1 Juli 2022

Dosen Pembimbing

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : M GALLIV AL HAVITZ
NPM : 1705180023
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIYAAAN ULTRA MIKRO
BAGI PENINGKATAN AKSEBILITAS LEMBAGA
KEUANGAN MASYARAKAT

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
24/9-2022	- Konsentrasi Judul. - Identifikasi masalah awal dan latar belakang. - Data - rumusan & hipotesis & temuan.		
4/10-2022	- Bab I ✓ - Bab II → Struktur & + - penelusuran bibliografi. - kerangka konseptual		
14/10-2022	- Bab II ✓ - Tambahan penelusuran bibliografi. - Grafik +. - Uraian.		
9/9-2022	Bab III - Sampul & format dg teori. - Analisis deskriptif - Kesimpulan Analisis akhir		
18/9-2022	Acc Semesta proposal		

Pembimbing

Dra. ROSWITA HAFNI, MSi

Medan, 18 September 2022

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini 19, Oktober 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan
nerangkan bahwa :

Nama : M Galliv Al Havitz
N.P.M. : 1705180023
Tempat / Tgl.Lahir : Stabat 03 Maret 2000
Alamat Rumah : Desa kebun tanah terban , Kab.aceh tamiang , Kec. karang baru
JudulProposal :Analisi Pembiayaan Ultra Mikro Bagi Peningkatan Aksesibilitas Lembaga
Keuangan Masyarakat

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	Data kontribusi UMI & MI terhadap PDB Indonesia, Rumus masalah
Bab II	tambah kan teori dari id Recado, dan asumsinya.
Bab III	analisis teori, jumlah di terbuat dengan teori.....
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19, Oktober 2022

TIM SEMINAR

Ketua


Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Pembimbing


Dra.Roswita Hafni,MSi

Sekretaris


Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding


Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH PIMPINAN PUSAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **19, Oktober 2022** menerangkan bahwa:

Nama : M Galliv Al Havitz
N .P.M. : 1705180023
Tempat / Tgl.Lahir : Stabat 03 Maret 2000
Alamat Rumah : Ds kebun tanah terban , Kab.aceh tamiang , Kec. karang baru
JudulProposal :Analisi Pembiayaan Ultra Mikro Bagi Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : *Dra.Roswita Hafni,MSi*

Medan, 19, Oktober 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Roswita Hafni,MSi

Pembanding

Dra.Hj. Lailan Safina Hasibuan. M.Si

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan -I

Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. GALLIVAL HAVITZ
N.P.M : 1705180023
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO BAGI PENINGKATAN AKSESIBILITAS LEMBAGA KEUANGAN MASYARAKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
21/10-2022	Acc perbikes proposal . - format Quesioner		
20/12-2022	- Acc Quesioner, Lembar Data - Data UMKM - Matrik pengaluan UMK		
4/1-2023	Poin IV → Pembahasan . - Diskusi per uraian UMK . - Analisis data data Quesioner . - Perhitungan dgn Grafik		
20/1-2023	- Perbaikan paper U Seminar Internasio . - Daftar Pustaka .		
26/1-2023	- Seminar Internasional MPCEB		
21/2-2023	- Acc Skripsi .		

Pembimbing Skripsi

Dr. ROSWITA AFNI, M.Si

Medan, Februari 2023
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi kami di agar diumumkan
sumber dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 505 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pada Tanggal : 2/22/2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : M. Galiv Al Havitz
N P M : 1705180023
Semester : X (Eks)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pembiayaan Ultra Mikro Bagi Peningkatan Aksesibilitas Lembaga Keuangan Masyarakat

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL, " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 22 Februari 2024**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1444 H
22 Februari 2023 M



Dekan

Dr. H. JANURI, SE.,MM.,M.Si.
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : M. Galliv Al Havitz
NPM : 1705180023
Tempat/Tanggal Lahir : Stabat / 03 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak Ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) Bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Emplasmen
Email : muhammadghalieh03@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Razali
Nama Ibu : Nur Diah
Alamat : Dusun Emplasmen

Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Percontohan
Sekolah Menengah Pertama : MTS Ulumul Quran Stabat
Sekolah Menengah Atas : MAN 1 Langsa
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)